

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju.

Program dan kegiatan di dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan yang disusun secara berkala, maka proses penyusunan Rencana Aksi diperlukan untuk dapat melakukan breakdown terhadap rencana pencapaian target dan kinerja yang telah disusun di dalam Renja. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditentukan melalui PPAS sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya melalui langkah monitoring dan evaluasi secara berkala.

B. TUJUAN

Sebagaimana telah dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka Tujuan Pembangunan yang menjadi fokus DPMPSTP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mencapai “ Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan “sebagi turunan dari Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

C. SASARAN DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah “*Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi*”.

D. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusan yang diemban tiap-tiap Perangkat Daerah, maka berdasarkan tiap sasaran strategis jangka menengah, telah ditetapkan Target Indikator Kinerja tahun 2024 pada Sasaran Pembangunan di atas sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Realisasi Investasi

No	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	-
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	370 M	-

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024, maka terdapat 6 (Enam) Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan : *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- Kegiatan : *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan : *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- *Kegiatan* : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- Sub Kegiatan : *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- Sub Kegiatan : *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- Sub Kegiatan : *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- Sub Kegiatan : *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan : *Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*

3. Program Promosi Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan : *Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal*
- Sub Kegiatan : *Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota*

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan : *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik*
- Sub Kegiatan : *Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko*
- Sub Kegiatan : *Penyediaan dan Pengelola Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko*
- Sub Kegiatan : *Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah*

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan : *Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*
- Sub Kegiatan : *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha*
- Sub Kegiatan : *Pengawasan Penanaman Modal*

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*

Kuala Tungkal, 23 Januari 2024

Kepala Dinas,

M.HAVIZ, SE

Pembina

NIP. 19740613 199602 1 001

Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen		59.204.000,00	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal																																	
						Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen		59.204.000,00																																		
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah provinsi dalam pemberian Fasilitas Insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	Penyediaan Peraturan Daerah Provinsi dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	59.204.000,00																																		
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor					80.996.000,00																																
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah sesuai Strategis yang di rencanakan					80.996.000,00																																
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Promosi Potensi dan Peluang Investasi	2 Dokumen	Keikut sertaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	80.100.000,00																																		
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab Kota	1 Dokumen	Laporan Kegiatan	896.000,00																																		
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						600.370.850,00	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																														
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal						600.370.850,00																															
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha	Persiapan rapat, penyediaan makan dan minum rapat, analisis dan rekapitulasi data penanaman modal, penentuan lokasi usaha	89.080.950,00																																				
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bimbingan Teknis Aturan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	Persiapan rapat, penyediaan makan dan minum rapat, pelaksanaan bintek, penyusunan laporan, pembinaan perusahaan	332.007.000,00																																				
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	Persiapan rapat, penyediaan makan dan minum rapat, pegawai ke lokasi usaha, penyusunan laporan	179.282.900,00																																				
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik					28.720.000,00																																		
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					28.720.000,00																																		
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Analisis Data : Persipan rapat, penyediaan makan dan minum rapat, pengelola sistem informasi perizinan berbasis elektronik, penyusunan laporan	28.720.000,00																																				
Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keuangan dan Profesionalitas Aparatur	Nilai IKM					Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Produk Perizinan (Jumlah Jenis/ Kelompok Izin)			73.594.000,00	Kabid Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabid Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																																	
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Piatu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pakaiian Dinas Beserta Perlengkapannya			73.594.000,00																																		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	3 Dokumen	Cetak himpunan peraturan, rapat makan dan minum, penyediaan produk hukum	27.350.000,00																																		
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	Cetak laporan IKM, rapat penyediaan makan dan minum, sewa hosting survey, upgrade sistem informasi, honorarium tim penyusun IKM	17.550.000,00																																		
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	Cetak laporan, rapat penyediaan makan dan minum, iklan	27.350.000,00																																		
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Cetak kegiatan layanan, cetak kegiatan pemeriksaan, makan minum kegiatan pemeriksaan perizinan dan non perizinan, makan minum kegiatan inovasi layanan, makan minum kegiatan investasi perizinan dan non perizinan	1.344.000,00																																				

Kuala Tungkal, 23 Januari 2024

Kepala Dinas,

M. HAVIZ, SE
Pembina

NIP. 19740613 199602 1 001